

Capacity Building Strategy: Financial Management Training and Governance Assistance for the Sustainability of Micro-Businesses

Dandy Danudra Djayapermana^{1*}, Annisa Darozah², Annisa Nur Aini³, Bulan Maharani⁴, Annisa Salsa Nabila⁵, Rini⁶, Zahra Maulida⁷, Raisya Ismail⁸, Siti Zahra Khalila Khairunnisa⁹,

Fikri Aziz Athoillah¹⁰, Deri Alan Kurniawan^{11*}

^{1,2,3,4}Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Garut

^{5,6,7,8}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Garut

⁹Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bisnis dan Informatika Indonesia

¹⁰Fakultas Kewirausahaan, Universitas Garut

¹¹Fakultas Ekonomi, Universitas Garut

*E-mail: derialan@uniga.ac.id

Abstract

This program aims to strengthen the financial management of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) through mentoring. The program focuses on 20 MSME operators in Sarimukti Village, Garut Regency, who face challenges with cash flow tracking and business legality. Implementation is carried out in phases and includes interactive workshop, Break-Even Point (BEP) calculation simulations, one-on-one mentoring, and evaluation through pre-test and post-test. The result of the program showed an increase in the participants understanding of business management, the importance of daily bookkeeping, and the Business Identification Number (NIB), from an average of 86,85% to 91,7%. In conclusion, practical financial management mentoring at the micro level has proven effective in building operational independence and serves as an important foundation for the sustainability and scaling up of MSME businesses.

Keyword: MSME Governance; Financial Management; Business Mentoring; Business Sustainability; Desa Sarimukti

Abstrak

Program ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pendampingan pengelolaan usaha. Objek kegiatan berfokus pada 20 pelaku UMKM di Desa Sarimukti, Kabupaten Garut, yang menghadapi kendala pencatatan arus kas dan legalitas usaha. Metode pelaksanaan dilakukan secara bertahap meliputi *workshop* interaktif,

Article Info:

Received 30 Agustus 2026

Received in revised 09 September 2026

Accepted 04 September 2026

Available online 14 September 2026

ISSN : 2745-6951

DOI :

<https://doi.org/10.35899/ijce.v7i3.1294>



Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE) is published under licensed of a CC BY-SA [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

e-ISSN : 2745-6951

DOI : <https://doi.org/10.35899/ijce.v7i3.1294>

simulasi perhitungan *Break-Even Point* (BEP), pendampingan personal, serta evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test*. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai tata kelola usaha, pentingnya pembukuan harian, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari rata-rata 86,85% menjadi 91,7%. Kesimpulannya, pendampingan tata kelola keuangan praktis pada tingkat mikro terbuka efektif membangun kemandirian operasional serta menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan dan perluasan skala bisnis UMKM.

Kata Kunci : Tata Kelola UMKM; Manajemen Keuangan; Pendampingan Usaha; Keberlanjutan Bisnis; Desa Sarimukti

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro didefinisikan sebagai kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha perorangan yang telah memenuhi ketentuan skala usaha mikro sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, usaha kecil dipahami sebagai kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan secara mandiri oleh perseorangan atau badan usaha, dengan syarat bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang dari usaha menengah atau usaha besar, baik yang dimiliki, dikuasai, maupun menjadi bagian darinya secara langsung ataupun tidak langsung, serta memenuhi kriteria usaha kecil yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah tenaga kerja tetap sebagaimana klasifikasi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan klasifikasi tersebut, usaha mikro memiliki hingga 4 pekerja tetap, usaha kecil memiliki 5 sampai 19 pekerja tetap, sedangkan usaha menengah memiliki 20 sampai 99 pekerja tetap. Sementara itu, usaha dengan jumlah pekerja tetap lebih dari 99 orang termasuk dalam kategori usaha besar [1].

Pelaku UMKM di Indonesia sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya transformasi digital bagi keberlangsungan usaha. Jumlah UMKM di Indonesia, Jawa Barat, dan Kabupaten Garut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena keberadaannya mampu membuka peluang usaha dan menyerap tenaga kerja. [2]. Pada aspek manajemen keuangan, dua hal yang menjadi faktor kunci keberlanjutan usaha adalah tingkat literasi keuangan pemilik usaha dan penerapan sistem pencatatan keuangan berbasis digital. Tanpa keduanya, pengelolaan keuangan usaha akan sulit berjalan efektif dan transparan.

Adanya keterhubungan yang erat antara aktivitas pemasaran digital dengan praktik manajemen keuangan. Keterkaitan tersebut tampak dalam tiga bentuk utama. Pertama, penggunaan sistem pembayaran digital yang mempermudah transaksi sekaligus pencatatan. Kedua, penyusunan konten pemasaran yang tidak hanya menarik tetapi juga mempertimbangkan efisiensi biaya. Ketiga, adanya upaya standarisasi proses bisnis agar kegiatan pemasaran dan keuangan dapat berjalan terintegrasi. Model peningkatan kapasitas yang disarankan meliputi 5 hal: pelatihan yang menyeluruh, pendampingan yang berkelanjutan, kerja sama antar ekosistem pendukung UMKM, standarisasi prosedur usaha, serta penerapan strategi untuk memitigasi risiko [3].



Jumlah UMKM di Indonesia, Jawa Barat, dan Kabupaten Garut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena keberadaannya mampu membuka peluang usaha dan menyerap tenaga kerja. Berdasarkan penelitian Rahmawati dkk. (2024), UMKM merupakan mayoritas pelaku usaha di Indonesia dengan persentase mencapai 99,99%. Pada tahun 2018, sektor UMKM juga tercatat memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki posisi yang kuat dalam mendukung kegiatan ekonomi nasional [4].

Tata kelola atau *governance* merupakan suatu sistem, struktur, dan prinsip dasar yang mengatur serta mengendalikan operasional bisnis agar dapat berjalan secara akuntabel, transparan, efisien, dan berkelanjutan. Konsep tata kelola mencakup tata cara pengambilan keputusan bisnis, mekanisme pengendalian internal, dan pelaksanaan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tata kelola diwujudkan dalam bentuk kedisiplinan pengelolaan keuangan harian, penerapan sistem pencatatan transaksi yang tepercaya, pemisahan dana operasional usaha dari anggaran rumah tangga pribadi, serta kepatuhan terhadap norma hukum dan legalitas usaha. Prinsip utama *Good Corporate Governance* (GCG) meliputi keterbukaan informasi (transparansi), kejelasan fungsi dan tanggung jawab (akuntabilitas), pemenuhan kewajiban terhadap aturan (responsibilitas), pengelolaan bebas dari benturan kepentingan (independensi), serta perlakuan yang berimbang bagi seluruh pihak (kewajaran) [5].

Desa Sarimukti merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Karyamekar dan mulai berdiri pada tahun 1983. Secara geografis, Desa Sarimukti memiliki luas wilayah 597,80 hektare dengan pusat pemerintahan yang berada pada ketinggian sekitar 1.350 meter di atas permukaan laut. Wilayah desa sebagian besar berupa kawasan pertanian, khususnya kebun dan tegalan, yang turut menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Pada tahun 2026, jumlah penduduk Desa Sarimukti tercatat sebanyak 5.987 jiwa dengan 1.757 kepala keluarga. Sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor yang berkaitan dengan pertanian. Data desa mencatat sebanyak 200 orang berprofesi sebagai petani, 1.500 orang sebagai buruh tani, dan 71 orang sebagai petani penggarap. Selain itu, terdapat 70 orang yang bekerja sebagai pedagang, serta masyarakat yang menjalankan kegiatan sebagai peternak, pengrajin, dan pelaku industri kecil.

Dari sisi sumber daya lokal, Desa Sarimukti memiliki beberapa komoditas pertanian yang dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Aktivitas perekonomian masyarakat juga didukung oleh beberapa sarana ekonomi yang terdapat di desa, yaitu satu BUMD, satu bank, dan dua toko. Jumlah UMKM di Desa Sarimukti [6]. Keterbatasan Akses Pembiayaan dan Modal Usaha: Pelaku usaha mikro serta unit ekonomi lokal (seperti inisiatif usaha mandiri dan bank sampah produktif) seringkali terkendala oleh minimnya ketersediaan modal serta sulitnya menjangkau skema pembiayaan formal. Kendala Tata Kelola dan Manajemen Bisnis: Sebagian besar pengelola usaha di tingkat desa belum menerapkan standar tata kelola manajerial yang profesional, yang berdampak langsung pada efisiensi operasional dan perencanaan keuangan jangka panjang. Berdasarkan hasil survei awal, permasalahan UMKM di Desa Sarimukti pada umumnya bukan terletak pada kualitas produk yang dihasilkan, melainkan pada aspek pengelolaan usaha dan pemasaran yang masih sederhana. Banyak pelaku UMKM di desa yang menjalankan usahanya secara turun-temurun dengan cara



konvensional, tanpa pencatatan keuangan yang jelas dan tanpa memanfaatkan media digital untuk memperluas pasar.

Implementasi seminar “Pemberdayaan UMKM Melalui Penguatan Tata Kelola: Mewujudkan UMKM Mandiri & Berkelanjutan”, solusi pertama yang ditawarkan adalah pendampingan pencatatan keuangan sederhana. Solusi kedua adalah pengenalan pemasaran digital, seperti memanfaatkan *WhatsApp Business*, Instagram, atau *marketplace* untuk memasarkan produk. Selain itu penting adanya pendampingan berkelanjutan, tidak hanya sebatas satu kali penyuluhan saat KKN berlangsung, tetapi idealnya ada tindak lanjut dari perangkat desa atau dinas koperasi setempat agar perubahan pola pikir dan kebiasaan pelaku UMKM benar-benar terbentuk dalam jangka panjang. Dengan demikian, UMKM di Desa Sarimukti diharapkan dapat berkembang secara lebih mandiri, terarah, dan berkelanjutan.

Mahasiswa Fakultas Ekonomi (Fekon) mempunyai peran dalam mendukung pelaksanaan KKN Tematik UNIGA 2026, terutama melalui penerapan ilmu ekonomi yang telah diperoleh selama perkuliahan. Kegiatan KKN menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan secara langsung di tengah masyarakat, sekaligus memahami berbagai kondisi dan permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di desa. Peran tersebut dilakukan melalui kegiatan pendampingan, pemberian edukasi, serta keterlibatan secara langsung dalam program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam bidang UMKM, mahasiswa Fekon dapat membantu masyarakat memahami pengelolaan usaha secara lebih terarah, salah satunya melalui pemahaman mengenai pencatatan pemasukan dan pengeluaran agar pelaku usaha dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya. Mahasiswa juga dapat membantu memperkenalkan strategi pemasaran yang lebih luas melalui pemanfaatan media digital sehingga pelaku UMKM memiliki peluang untuk mengenalkan produk dan memperoleh konsumen baru. Upaya tersebut perlu didukung dengan penerapan tata kelola usaha yang baik agar pengelolaan UMKM dapat berjalan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik menjadi instrumen utama dalam menjaga keberlangsungan usaha (*business sustainability*) dan memperluas skala bisnis UMKM di tengah persaingan pasar [7].

Program ini dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pendekatan praktis dan aplikatif. Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi pemisahan antara kas pribadi dan aset usaha, yang sering kali menjadi kendala utama dalam manajemen bisnis skala mikro. Melalui penguasaan teknik pencatatan transaksi masuk dan keluar secara tertib, pelaku usaha diharapkan mampu menyusun laporan keuangan sederhana yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan operasional.

II. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. Tahap Pra-Pelaksanaan (Orientasi dan Perancangan)

Fase awal berfokus pada identifikasi dan pemetaan masalah usaha mikro melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap tata kelola keuangan awal. Hasil asesmen menjadi acuan dalam perancangan modul edukasi, format lembar kerja pencatatan kas, serta penentuan indikator keberhasilan program.

2. Tahap Pelaksanaan (Implementasi dan Pendampingan)

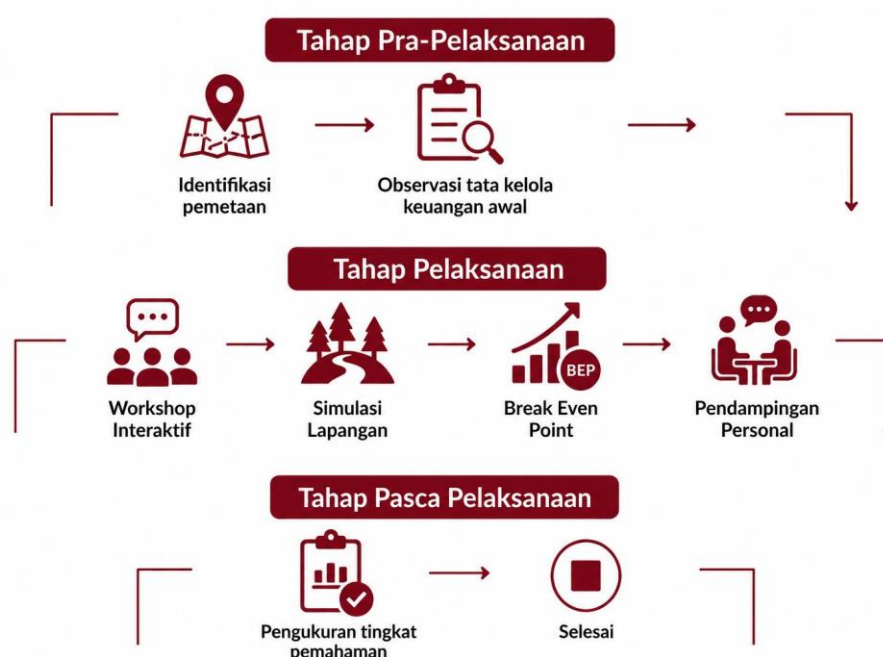
Pelaksanaan program memadukan tiga metode utama, yaitu:



- 1) **Workshop Interaktif**
Penyampaian konsep tata kelola finansial, pemisahan arus kas, dan formulasi Harga Pokok Produksi (HPP).
- 2) **Simulasi Lapangan**
Pelatihan kepada pelaku usaha untuk mempraktikkan pencatatan transaksi harian serta melakukan kalkulasi *Break-Even Point* (BEP) berdasarkan data aktual usaha.
- 3) **Pendampingan Personal**
Pembimbingan teknis secara *one-on-one* untuk membantu menyelesaikan kendala spesifik dalam penyusunan laporan keuangan sederhana. Peserta juga diberikan kesempatan untuk bertanya selama proses pendampingan.

3. Tahap Pasca-Pelaksanaan (Evaluasi dan Keberlanjutan)

Evaluasi efektivitas dilakukan melalui pengukuran tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan dengan mengerjakan *pre-test* dan *post-test* mengenai tata kelola usaha.



Gambar 1. Metode pelaksanaan Seminar

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan program kerja penyuluhan mengenai penguatan tata kelola UMKM dilaksanakan di Aula Kantor Desa Sarimukti, mulai pukul 13.00 WIB sampai selesai. Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta yang merupakan pelaku UMKM di Desa Sarimukti. Tema Program Kerja Fakultas Ekonomi KKN Tematik Kelompok 31 di Desa Sarimukti adalah “Pemberdayaan UMKM Melalui Penguatan Tata Kelola: Mewujudkan UMKM Mandiri & Berkelanjutan”. Dengan Narasumber Deri Alan Kurniawan, S.E., M.M. selaku dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Garut. Tema ini diangkat berdasarkan temuan di lapangan



yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM lokal menghadapi kendala mendasar pada kualitas pengelolaan usaha dan kedisiplinan pembukuan keuangan. Pokok bahasan dalam tema program kerja ini mencakup penguatan fondasi tata kelola keuangan melalui pengenalan sistem pemisahan kas usaha dan kas dapur (Sistem Amplop), penerapan pencatatan harian arus kas masuk dan keluar secara konsisten, serta kalkulasi Anatomi Harga Pokok Produksi (HPP) secara matematis. Sebelum seminar dimulai, peserta diminta untuk mengisi kuesioner mengenai status dari UMKM, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Identitas Usaha dari Peserta Penyuluhan

No	Pertanyaan	Hasil
1	Lama usaha UMKM yang dimiliki	
	0-1 tahun	30%
	2 -5 tahun	30%
	Lebih dari 5 tahun	40%
2	Status UMKM yang dimiliki	
	Dirintis dari nol	85%
	Warisan orang tua/keluarga	5%
	Usaha patungan dengan pihak ketiga	10%
3	Modal awal yang dikeluarkan	
	Kurang dari Rp 1.000.000	35%
	Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000	45%
	Lebih dari Rp 1.000.000	20%
4	Kendala usaha	
	Penambahan modal dan Pemasaran	40%
	Pengelolaan manajemen keuangan dan pembukuan	40%
	Belum memiliki NIB	20%

Berdasarkan tabel 1, jenis UMKM peserta antara lain: warung sembako, warung seblak, cuankie dan bakso, usaha produksi kerupuk rumahan, dan lain sebagainya. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan sesi tanya jawab mengenai pentingnya tata kelola usaha dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan UMKM, seperti yang terdapat pada gambar 2.



Gambar 2. Sesi Pemaparan Materi



Pre-test dan *post-test* dilakukan dalam pelaksanaan program kerja (PROKER) untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan, seperti yang terlihat pada gambar 3. Hasil dari kedua tes tersebut dapat dibandingkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, atau kemampuan peserta. Selain itu, hasil *pre-test* dan *post-test* juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai efektivitas program kerja serta menjadi acuan dalam melakukan perbaikan pada kegiatan selanjutnya [8].



Gambar 3. Sesi *Pre/Post Test*

Tabel 2. Tingkat Pengetahuan Warga

No	Pertanyaan	Sebelum Penyuluhan	Setelah Penyuluhan
1.	Tata kelola yang baik (<i>good governance</i>) bagi UMKM	75%	90,5%
2.	Pencatatan keuangan sangat penting dalam tata kelola UMKM	80%	90,5%
3.	Kegunaan dari Legalitas usaha seperti NIB	85%	92,5%
4.	Ciri dari salah satu tata kelola bisnis yang buruk	85%	92,5%
5.	Tujuan utama dari Penguatan tata kelola pada UMKM?	85%	92,5%
Rata-rata		86,85%	91,7%

Berdasarkan tabel 2, pemahaman peserta mengenai arti tata kelola yang baik (*good governance*) bagi UMKM hasilnya sangat tinggi yaitu sebesar 90,5%. Berdasarkan hasil seminar, para pelaku usaha ini sebenarnya sudah paham soal kejujuran dan tanggung jawab ke konsumen, akan tetapi peserta berasumsi istilah tata kelola yang baik itu hanya untuk perusahaan besar. UMKM yang mandiri membutuhkan pengelolaan usaha yang baik, terutama dalam mengatur keuangan dan kegiatan operasional.

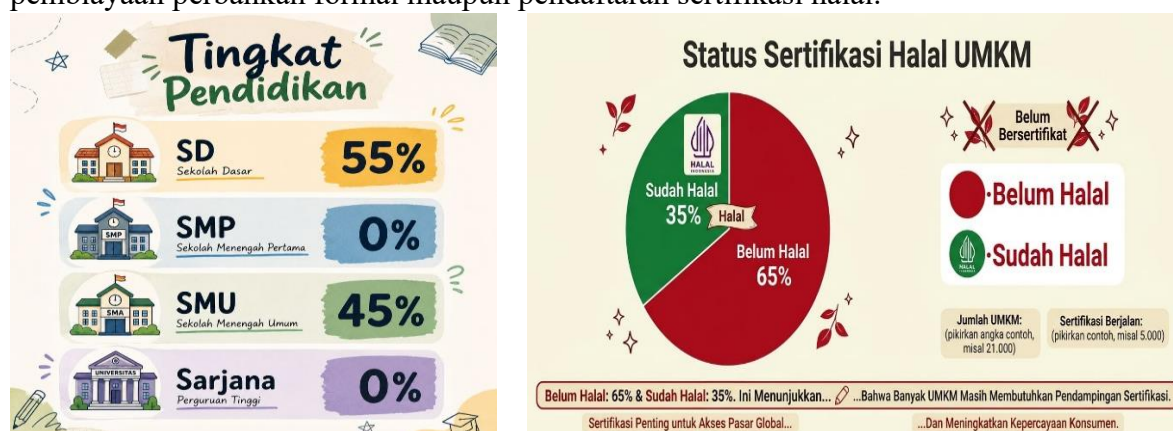
Pembahasan

Tujuan utama dari penguatan tata kelola keuangan pada sektor UMKM adalah untuk mengoptimalkan kinerja operasional dan finansial, sehingga usaha mampu bertahan, berkembang, serta mengekspansi skala bisnisnya secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan



yang efektif berfungsi meminimalkan berbagai risiko bisnis, seperti potensi kerugian modal dan kendala likuiditas. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pemisahan antara uang usaha dengan uang pribadi [9]. Melalui tata kelola yang baik, pelaku usaha didorong untuk memisahkan rekening pribadi dan modal usaha, mencatat setiap transaksi secara sistematis, serta mengontrol arus kas, aset, dan kewajiban secara akurat. Penerapan sistem pencatatan yang terstruktur juga mempermudah UMKM dalam mengakses fasilitas kredit perbankan serta merencanakan investasi permodalannya secara lebih matang, tertata, dan profesional [10].

Berdasarkan tabel 2, setelah penyuluhan pemahaman warga mengenai pentingnya memiliki NIB sangat tinggi yaitu sebesar 92,5%. Menurut pendapat dan analisis mahasiswa FEKON selama pendampingan KKN di Desa Sarimukti, terdapat lima faktor utama yang menyebabkan para pelaku UMKM lokal belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Faktor pertama adalah keterbatasan literasi digital dan pemahaman teknis dalam mengoperasikan sistem *Online Single Submission* (OSS), mengingat sebagian besar pelaku usaha mikro merupakan kelompok usia dewasa yang kurang terbiasa dengan aplikasi perizinan berbasis elektronik. Faktor kedua adalah adanya anggapan atau persepsi keliru di kalangan masyarakat desa bahwa proses pembuatan izin usaha itu rumit, menyita waktu, dan membutuhkan biaya mahal, padahal pendaftaran NIB skala mikro sebenarnya tidak dipungut biaya (gratis). Faktor ketiga adalah belum kuatnya pemahaman warga mengenai pentingnya legalitas usaha. Faktor keempat adalah kendala sarana pendukung, internet untuk melakukan registrasi mandiri. Faktor kelima adalah belum meratanya jangkauan sosialisasi dari instansi terkait hingga ke tingkat pelosok desa. Akibatnya, UMKM kesulitan mengakses fasilitas pembiayaan perbankan formal maupun pendaftaran sertifikasi halal.



Gambar 4. Persentase Tingkat Pendidikan Peserta dan Status UMKM Sarimukti

Kepemilikan sertifikasi halal memiliki peranan strategis dalam meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pasar lokal maupun global. Secara ekonomi, sertifikasi ini berfungsi sebagai instrumen *differentiator* yang memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan kepuasan konsumen. Akselerasi jumlah produk bersertifikat halal di pasaran turut memperkaya preferensi publik, sehingga memberikan keleluasaan bagi masyarakat dalam memilih barang yang sesuai dengan standar keyakinan [11].



Berdasarkan gambar 4, jumlah UMKM yang sudah bersertifikat halal di desa Sarimukti sebesar 35%. Dari perspektif perlindungan konsumen, sertifikasi halal menghadirkan jaminan legalitas dan kualitas yang mencakup aspek kebersihan, keutuhan, serta keamanan pangan (*food safety*). Hal ini memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat dalam mengonsumsi suatu produk [12]. Bagi pelaku usaha, transparansi status kehalalan produk mampu membangun kredibilitas merek (*brand trust*) dan loyalitas pelanggan. Pada akhirnya, penerbitan sertifikat halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan langkah krusial dalam menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan [13].

Berdasarkan hasil observasi terhadap pelaku UMKM di Desa Sarimukti, salah satu faktor yang diduga menjadi kendala dalam memperoleh sertifikasi halal adalah tingkat pendidikan pelaku usaha yang masih relatif rendah. Dari 20 pelaku UMKM yang diundang dalam kegiatan Seminar Pemberdayaan UMKM, sekitar 55% di antaranya memiliki tingkat pendidikan terakhir pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari tata kelola usaha.

Pencatatan keuangan memiliki peranan penting dalam tata kelola UMKM karena menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk memahami kondisi keuangan, mengevaluasi kinerja, dan menentukan arah pengembangan usaha. Dalam praktiknya, masih banyak pelaku UMKM yang belum melakukan pencatatan secara teratur dan terstruktur. Kondisi tersebut salah satunya berkaitan dengan keterbatasan pemahaman akuntansi serta anggapan bahwa pencatatan keuangan hanya diperlukan untuk kepentingan tertentu dari pihak luar. Padahal, informasi yang diperoleh dari pencatatan dapat membantu pemilik usaha mengetahui pemasukan dan pengeluaran secara lebih jelas sehingga keputusan usaha dapat dibuat berdasarkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Pencatatan yang dilakukan secara tertib juga mendukung pengendalian internal. Data transaksi yang lengkap dapat digunakan untuk menelusuri aktivitas usaha, membandingkan hasil yang diperoleh dengan rencana, serta menemukan kemungkinan kesalahan atau penyimpangan. Sebaliknya, pencatatan yang tidak konsisten membuat proses pemeriksaan internal menjadi kurang efektif karena bukti transaksi yang dapat diverifikasi terbatas. Dengan demikian, pencatatan keuangan bukan hanya kegiatan administratif, tetapi merupakan bagian dari tata kelola UMKM yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha. Pemanfaatan pencatatan digital juga dapat membantu membuat data lebih rapi dan mudah ditelusuri [14].

Berdasarkan pengamatan dan evaluasi mahasiswa FEKON selama sesi pelatihan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang sangat baik mengenai krusialnya pencatatan keuangan dalam tata kelola usaha. Sebelum kegiatan, mayoritas warga terjebak pada persepsi keliru bahwa pembukuan akuntansi itu rumit dan hanya berfokus pada besarnya omzet harian tanpa memisahkan modal dan keuntungan. Hal ini menyebabkan modal usaha sering menguap untuk kebutuhan rumah tangga. Setelah mendengarkan pemaparan materi dan mengikuti simulasi praktis, peserta mulai menyadari bahwa omzet yang besar tidak menjamin keberadaan laba bersih.



Peserta sangat memahami pentingnya memisahkan uang usaha dan uang pribadi menggunakan teknik “Sistem 3 Amplop” serta rutin mencatat arus kas masuk dan keluar secara sederhana. Selain itu, peserta mengerti cara menghitung Anatomi Harga Pokok Produksi (HPP) agar penetapan harga jual tidak merugikan dan tidak terjebak promosi diskon yang menggerus margin. Menurut analisis mahasiswa FEKON, peserta kini memahami bahwa pembukuan yang tertib merupakan fondasi utama untuk menilai kesehatan keuangan bisnis, mencegah kebocoran modal, serta menjadi syarat utama apabila di kemudian hari ingin mengajukan permodalan ke lembaga keuangan formal. Untuk mendukung penyampaian materi secara langsung, peserta juga diberikan *flyer* penyuluhan, tujuannya adalah sebagai media pendukung agar peserta lebih paham terhadap materi yang disampaikan karena dapat membaca informasi secara berulang-ulang [15]. *Flyer* penyuluhan dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 6. Flyer Penyuluhan dan Peserta Seminar

Selama sesi tanya jawab pada kegiatan penyuluhan, peserta menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi melalui berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Salah satu hal yang banyak ditanyakan adalah mengenai cara membuat laporan keuangan dan bagaimana memulai pencatatan keuangan bagi pelaku usaha yang belum terbiasa melakukan pembukuan. Peserta ingin mengetahui pencatatan sederhana yang dapat dilakukan untuk mengetahui pemasukan, pengeluaran, modal, serta keuntungan usaha tanpa harus menggunakan sistem yang terlalu rumit. Selain pencatatan keuangan, peserta juga menyampaikan pertanyaan mengenai penentuan harga jual produk. Beberapa peserta merasa bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha di desa relatif kecil, sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana menentukan harga jual yang tetap sesuai dengan kondisi dan daya beli masyarakat, tetapi tetap dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha. Peserta juga ingin mengetahui bagaimana cara menghitung keuntungan secara tepat agar harga jual yang ditetapkan tidak hanya mampu menutupi biaya produksi, tetapi juga memberikan keuntungan yang layak.

Secara keseluruhan adanya peningkatan pengetahuan para peserta sebelum dan sesudah penyuluhan. Dengan demikian, mahasiswa FEKON menilai bahwa seminar



pemberdayaan UMKM memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman peserta mengenai tujuan penguatan tata kelola. Kegiatan tersebut tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mendorong pelaku UMKM untuk mulai menerapkan tata kelola yang lebih terstruktur dalam kegiatan usahanya. Namun, pendampingan secara berkelanjutan tetap diperlukan agar pemahaman tersebut dapat diterapkan secara konsisten. Berikut dokumentasi antara narasumber dan mahasiswa FEKON, seperti terdapat pada gambar 7.



Gambar 7. Narasumber dan Mahasiswa FEKON

Setelah kegiatan seminar dilakukan, tim mahasiswa FEKON, mengunjungi UMKM yang ada di Sarimukti, untuk mengevaluasi keberhasilan dari program seminar dan mengedukasi kembali dalam bentuk *flyer* penyuluhan. Hasil kunjungan dapat dilihat pada gambar 8. UMKM yang dikunjungi antara lain: Produksi Kerupuk milik Ibu Nining, Warung Sembako milik Ibu Teti, Warung seblak, cuankie dan bakso milik Ibu Apong, Produksi Kupas Kentang milik Ibu Ai Leni. Dalam kunjungan ini didampingi oleh bapak Fikri Aziz Athoillah, dari Fakultas Kewirausahaan.



Produk Kerupuk



Warung Sembako





Produksi Kupas Kentang



Warung Seblak

Gambar 8. Kunjungan ke UMKM

Mahasiswa berharap setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, para peserta tidak hanya memahami materi yang telah disampaikan, tetapi juga dapat menerapkannya dalam menjalankan usaha sehari-hari. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan menjadi bekal bagi peserta untuk lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha, baik dari segi pengelolaan, pemasaran, maupun peningkatan kualitas produk. Penyuluhan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pemberian materi saja, tetapi dapat memberikan perubahan nyata terhadap cara peserta menjalankan usahanya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan program penyuluhan dan pendampingan tata kelola UMKM di Desa Sarimukti, secara umum memberikan dampak positif bagi peningkatan pemahaman para pelaku usaha. Hal ini terbukti berdasarkan hasil evaluasi *pre-test* dan *post-test* yang diberikan kepada 20 peserta, di mana rata-rata tingkat pengetahuan meningkat dari 86,85% menjadi 91,7%. Dari segi pemahaman, para peserta kini menyadari pentingnya penerapan tata kelola yang baik, mulai dari pemisahan uang usaha dan uang pribadi menggunakan sistem amplop, pencatatan kas harian secara disiplin, perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) yang tepat, hingga urgensi kepemilikan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal untuk keberlanjutan usaha.

Saran ke depannya para pelaku UMKM diharapkan dapat konsisten menerapkan pembukuan harian sederhana dan tidak lagi mencampurkan usaha dengan kebutuhan rumah tangga. Pihak pemerintah Desa setempat serta dinas terkait disarankan untuk memberikan pendampingan secara berkesinambungan, khususnya dalam memfasilitasi pembuatan NIB dan pendaftaran sertifikasi halal bagi warga. Agar dampak program semakin luas, tim KKN periode berikutnya dapat melanjutkan pendampingan berbasis digitalisasi akuntansi sederhana melalui aplikasi *smartphone*.

V. REFERENSI

- [1] S. Al Farisi, M. I. Fasa, and Suharto, "Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.," *J. Din. Ekon. Syariah*, vol. 9, no. 1, pp. 73–84, 2022, doi: <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i1.307>.
- [2] Hanifah, H. Siti, E. Kartiko, W. A. Anggraeni, and Nurbudiwati, "Penguatan



- Pendidikan Kewirausahaan Dan Jaringan Sosial UMKM Bumdes Bina Laksana Samarang Kabupaten Garut,,” *J. Pengabdi. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 216–226, 2023.
- [3] Y. V. Elim, M. Nugraha, Z. Umar, and A. R. Modena, “Dampak Digital Marketing Terhadap Kinerja UMKM Di Kota Kupang Pada Masa Pandemi Covid-19,,” *J. Ilm. Ekon. Dan Bisnis*, vol. 17, no. 1, pp. 97–110, 2024.
- [4] A. Pratama and H. Kurniawan, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,,” *J. Akunt. dan Keuang. Indones.*, vol. 19, no. 2, pp. 115–132, 2022.
- [5] D. Rahmawati, M. N. Apriady, and Wisudanto, “Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk), Akibat Meningkatnya Jumlah Pelaku Umkm Di Indonesia,,” *Sebatik*, vol. 28, no. 1, pp. 1410–3737, 2024.
- [6] R. C. P. Ashillah, E. Rachmawati, D. Rochdiani, and L. Trimio, “Efisiensi teknis usahatani kentang di Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut,,” *Mimb. Agribisnis J. Pemikir. Masy. Ilm. Berwawasan Agribisnis*, vol. 10, no. 2, pp. 2890–2897, 2024.
- [7] L. P. Ekawati, N. W. Y. Dewi, and P. R. Astria, “Digitalisasi akuntansi sebagai upaya tata kelola bagi keberlanjutan UMKM Kabupaten Buleleng,,” *JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi)*, vol. 16, no. 3, pp. 738–748, 2025.
- [8] B. A. Hermawan, S. M. Anggraeni, P. L. Khoerunnisa, S. Shabila, and N. Lubis, “Mewujudkan Siswa Sehat Melalui Edukasi Kesehatan Bijak Dalam Memilih Jajanan,,” *J. Abdimas Univers.*, vol. 8, no. 1, pp. 285–292, 2026.
- [9] D. Artati, “Analisis Intellectual Capital dan Good Corporate Governance Pada Kinerja UMKM di Kabupaten Garut,,” *J. Ekon. Pembang.*, vol. 6, no. 2, pp. 2614–7181, 2024.
- [10] E. M. Utami, D. M. Puspitasari, F. Nursjanti, L. Amaliawiati, and R. Yuliani, “Penguatan Tata Kelola Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kampoeng Rajoet Bandung,,” *Madaniya*, vol. 4, no. 1, pp. 384–357, 2023.
- [11] G. A. F. Maulan, E. Dinanti, S. Mustika, N. A. Hamdani, and I. Permana, *The Influence of Product Composition Information and Brand Trust on Purchasing Decision*, no. Gcbme 2023. Atlantis Press International BV, 2024.
- [12] N. Fauziah *et al.*, “The Influence of Counseling on Increasing the Knowledge of Cikelet Village Community Regarding Halal Products,,” *J. Indones. J. Community Empower.*, vol. 3, no. 4, pp. 149–158, 2022.
- [13] P. Y. Leksono *et al.*, “Sosialisasi peranan sertifikat halal untuk meningkatkan performa UMKM bagi masyarakat Kabupaten Kediri,,” *J. Pustaka Mitra*, vol. 4, no. 1, pp. 18–25, 2024, doi: <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v4i1.669>.
- [14] D. Zahara *et al.*, “Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Pentingnya Pencatatan Keuangan Sederhana dan Dampaknya pada Audit Internal,,” *J. Transform. Ekon. dan Inov. Keuang.*, vol. 10, no. 1, pp. 81–90, 2026.
- [15] F. M. Fadhillah *et al.*, “Penyuluhan Gizi Seimbang Sebagai Upaya Meningkatkan Kesehatan Siswa Di Sdn 2 Parakan Kecamatan Samarang Kabupaten Garut,,” *To Maega | J. Pengabdi. Masy.*, vol. 8, no. 2, pp. 301–311, 2025.

